

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI



TAHUN ANGGARAN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR GRAFIK	5
KATA PENGANTAR	6
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
BAB I	10
A. DASAR HUKUM.....	10
B. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI	11
C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI	12
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	13
E. PERMASALAHAN UTAMA	14
F. SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA.....	15
BAB II	17
A. RENCANA STRATEGIS	17
1. Visi, Misi dan Tujuan	17
2. Strategis Kebijakan.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA.....	18
BAB III	21
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan II TA 2023	21
C. Efisiensi	62
BAB IV	65



DAFTAR TABEL

TABEL 1	8
TABEL 2	9
TABEL 3	15
TABEL 4	18
TABEL 5	19
TABEL 6	19
TABEL 7	21
TABEL 8	22
TABEL 9	23
TABEL 10	24
TABEL 11	26
TABEL 12	28
TABEL 13	38
TABEL 14	45
TABEL 15	50
TABEL 16	51
TABEL 17	56
TABEL 18	57
TABEL 19	57
TABEL 20	59
TABEL 21	60
TABEL 22	63
TABEL 23	63
TABEL 24	64



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	13
GAMBAR 2	25
GAMBAR 3	25
GAMBAR 4	27
GAMBAR 5	30
GAMBAR 6	31
GAMBAR 7	31
GAMBAR 8	32
GAMBAR 9	33
GAMBAR 10	34
GAMBAR 11	35
GAMBAR 12	36
GAMBAR 13	36
GAMBAR 14	37
GAMBAR 15	37
GAMBAR 16	39
GAMBAR 17	41
GAMBAR 18	41
GAMBAR 19	42
GAMBAR 20	42
GAMBAR 21	43
GAMBAR 22	44
GAMBAR 23	44



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1	29
GRAFIK 2	64

KATA PENGANTAR

Ungkapan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahunan 2023 dapat tersusun. Sebagai salah satu unit koordinasi yang berada di lingkup Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berkewajiban menyusun Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 13, Bab IV dalam Peraturan MENPAN-RB No.29 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri bertujuan untuk :

- a. Sarana bagi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban kinerja;
- b. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya penyempurnaan kinerja di masa mendatang, terutama dalam hal penguatan politik luar negeri Indonesia di dunia Internasional.

Suksesnya program kegiatan yang telah terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana menjadi tolak ukur keberhasilan untuk kegiatan di masa yang akan datang, namun demikian hambatan dan kendala selama Tahun 2023 ini akan menjadi bahan evaluasi pada perbaikan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi dan evaluasi kinerja guna penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Tahun 2023 menjadi periode yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia memegang keketuaan ASEAN dengan tema "*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*". Hal ini menjadi penting bagi terutama karena Kepemimpinan Indonesia melalui Menko Polhukam Pada Forum ASEAN *Political-Security Community* (APSC) ke-26 dan ke-27 yang diselenggarakan pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo dan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta.



Selain kehadiran Menko Polhukam pada Forum APSC di KTT ASEAN, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri juga menyelenggarakan Forum Kerja Sama Internasional, baik bilateral maupun multilateral pada tahun 2023.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran negara, capaian kinerja dituangkan secara lengkap di dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja untuk mengukur performa kinerja organisasi secara komprehensif. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat terus memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan serta menjadi rujukan valid dalam melihat dan meningkatkan performa Sistem Manajemen Kinerja di Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Jakarta, Februari 2023

Deputy Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri,

R RINA P. SOEMARNO



Selain kehadiran Menko Polhukam pada Forum APSC di KTT ASEAN, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri juga menyelenggarakan Forum Kerja Sama Internasional, baik bilateral maupun multilateral pada tahun 2023.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran negara, capaian kinerja dituangkan secara lengkap di dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri TA 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja untuk mengukur performa kinerja organisasi secara komprehensif. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat terus memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan serta menjadi rujukan valid dalam melihat dan meningkatkan performa Sistem Manajemen Kinerja di Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

PARAF KOORDINASI		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sesdep II	
2.	Perencana Madya	
3.	Perencana Muda	

Jakarta, Februari 2023

Deputy Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri,

RINA P. SOEMARNO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Amerika, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Multilateral dan Sekretaris Deputi.

Politik Luar Negeri merupakan arah kebijakan atau strategi suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah serta sasaran untuk kepentingan nasional negara dalam lingkup dunia internasional. Untuk menciptakan hubungan internasional tersebut diperlukan sasaran strategis dalam meningkatkan kualitas diplomasi dan kerjasama luar negeri Indonesia serta terselenggaranya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja.

Capaian Kinerja Tahunan 2023 dapat terlihat dalam Tabel Capaian sebagaimana berikut :

Tabel 1
Tabel Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	101,84%	101,84%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	a. Nilai SAKIP	BB	BB (76,9)	100%
	b. Nilai PMPRB	31	31	100%
	c. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	4	100%

Pagu anggaran Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp13.057.540.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.935.110.504 (*Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*) atau sebesar 99,06% dengan rincian penyerapan per Eselon II sebagai berikut.

Tabel 2
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2023
Berdasarkan Eselon II atau Rincian Output

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa Anggaran
ABC.001	Asdep Kerma Aspasaf	2.499.226.000	2.485.488.584	99,46 %	13.737.416
ABC.002	Asdep Kerma Amerop	2.221.112.000	2.207.385.268	99,38 %	13.726.732
ABC.004	Asdep Kerma Multilateral	1.587.935.000	1.581.621.763	99,60 %	6.313.237
PBC	Asdep Kerma ASEAN	5.214.514.000	5.153.142.409	98,82 %	61.371.591
EBA+EBD	Sekretariat Deputy Pollugri	1.534.753.000	1.507.472.480	98,22 %	27.280.520
DEPUTI BIDKOOOR POLLUGRI		13.057.540.000	12.935.110.504	99,06 %	122.429.496

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi, dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Surat Edaran Sesmenko Polhukam Nomor 121 Tahun 2017 tentang Panduan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam.

B. TUGAS DAN FUNGSI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tersebut, tugas Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri.

Dalam pelaksanaan tugas, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri
3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Asia dan Pasifik;
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Afrika;
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Timur Tengah;
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Amerika;
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Eropa;
8. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ASEAN;
9. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama Multilateral;
10. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Politik Luar Negeri;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidkooor Pollugri;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputy Bidkooor Pollugri melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Hukum dan HAM;

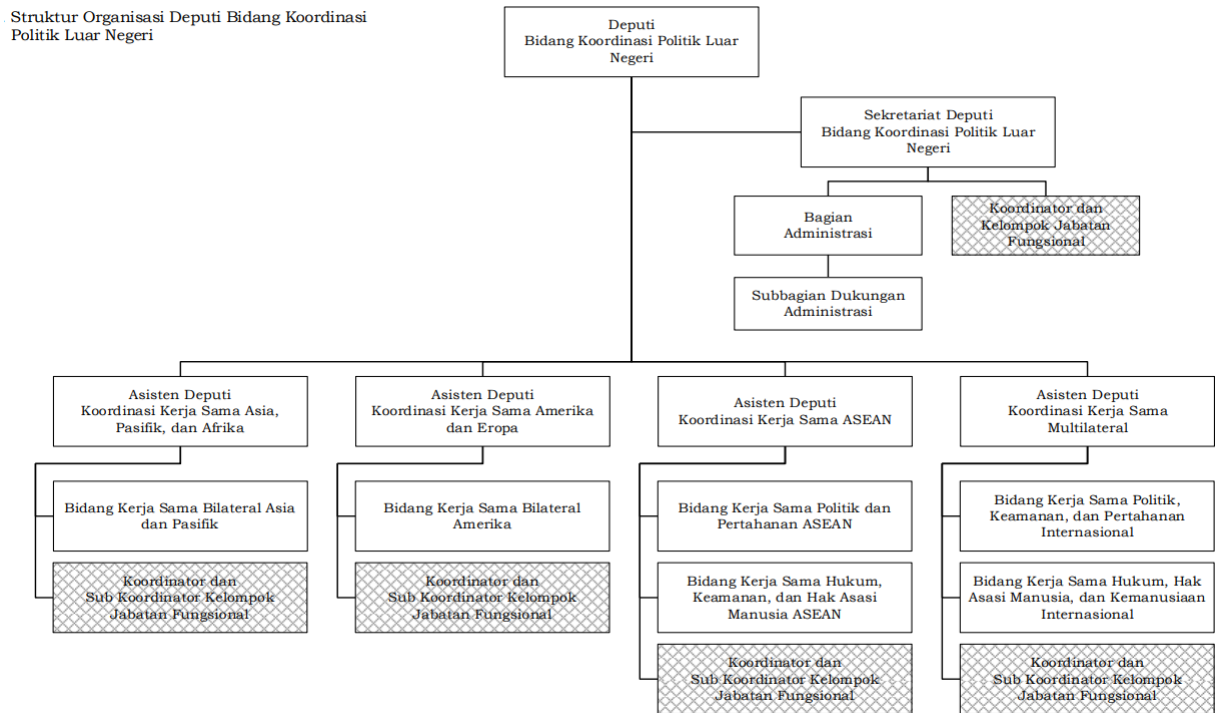
5. Kementerian Kominfo;
6. Kementerian PAN & RB;
7. Kejaksaan Agung;
8. Badan Intelijen Negara
9. Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepolisian Negara RI;
11. Instansi lain yang dianggap perlu.

C. STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor : 1 Tahun 2023 tanggal 28 Oktober 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dibantu oleh 5 (lima) orang Pejabat Eselon II yang terdiri dari:
 - a. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika;
 - b. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
 - c. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama ASEAN;
 - d. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Multilateral;
 - e. Sekretaris Deputy
2. Asisten Deputy dibantu oleh Kepala Bidang Kerjasama Politik dan Pertahanan ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, Keamanan dan HAM ASEAN, Kepala Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik, Kepala Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah, Kepala Bidang Kerjasama Amerika, Kepala Bidang Kerjasama Eropa, Kepala Bidang Kerjasama Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional, Kepala Bidang Kerjasama Hukum, HAM dan Kemanusiaan Internasional serta para analis kebijakan.
3. Sekretariat Deputy, terdiri dari Sekretaris Deputy setingkat Eselon II dibantu oleh Perencana Ahli Madya, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Perencana Ahli Muda, Analis Anggaran Muda, Arsiparis Muda, Kepala Sub Bagian Umum, Arsiparis Pertama, Pengadministrasi Umum, Pengelola Program dan Kegiatan, Pengevaluasi Program dan Kinerja dan Staf Tata Usaha.

Gambar 1
Struktur Organisasi Deputy Bidkoo Pollugri



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Politik Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

E. PERMASALAHAN UTAMA

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap masa depan pembangunan Indonesia. Persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat (AS) merespons Tiongkok dengan menggelar kekuatannya di LTS. ASEAN telah mengupayakan pembentukan Code of Conduct (CoC) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi pada prosesnya menemui hambatan.

Mudahnya pergerakan aktor non negara secara trans-nasional membuat dinamika ancaman non tradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia. Isu permasalahan utama yang mendapat perhatian besar adalah: (1) Terorisme; (2) Perdagangan manusia, khususnya pada perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia; (3) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia; (4) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan (5) Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu menjadi perhatian Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata kelola global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan unilateral.

Prioritas kebijakan bidang kerjasama pembangunan internasional saat ini adalah mendukung kerja sama pembangunan internasional dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, beberapa isu yang dihadapi antara lain:

- Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST) untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi melalui pertukaran pengetahuan dan keahlian.
- Dari sisi kelembagaan, diperlukan pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu agar kerjasama pembangunan internasional dapat dilaksanakan secara integratif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional
- Dari sisi pendanaan, perlunya pemanfaatan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru, misalnya skema kredit ekspor melalui
- Pada Aspek Sosial-budaya, Citra positif Indonesia sangat penting dalam pergaulan Internasional, sehingga Indonesia perlu melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional.

Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif, keanekaragaman budaya, dan diaspora Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia yang akan ditampilkan kepada publik internasional.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi kebijakan luar negeri terdapat target program prioritas, yaitu memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri.

Indonesia telah menjadi anggota aktif di 233 organisasi/forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB. Indonesia perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional. Pada tingkat domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.

F. SUMBER DAYA ORGANISASI/SUMBER DAYA MANUSIA

1. Anggaran

Pagu Anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Per 31 Desember TA 2023 setelah relaksasi *Automatic Adjustment* (cadangan pemotongan) adalah sebesar Rp13.057.540.000,- dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 3

Pagu Anggaran Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.499.226.000
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.221.112.000
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.587.935.000
PBC.001	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.489.314.000
PBC.002	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.725.200.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	664.158.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	870.595.000

Total Anggaran Kedeputian Bid. Koord. Politik Luar Negeri 2023**13.057.540.000**

2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Kemenko Polhukam, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh:

1. Sekretariat Deputy;
 - 1.1. Bagian Administrasi
 - 1.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
 - 2.1. Bidang Kerjasama Bilateral Asia dan Pasifik;
 - 2.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
 - 3.1. Bidang Kerjasama Bilateral Amerika
 - 3.2. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama ASEAN
 - 4.1. Bidang Politik dan Pertahanan ASEAN;
 - 4.2. Bidang Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia ASEAN;
 - 4.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Asisten Deputy Koordinasi Kerjasama Multilateral
 - 5.1. Bidang Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional;
 - 5.2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional.
 - 5.3. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 6.1. Fungsional Tertentu;
 - 6.2. Fungsional Umum.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Deputy Bidkooor Pollugri 2023-2024 mencakup visi, misi, program dan Indikator Kinerja. Rencana strategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidkooor Pollugri menetapkan Visi yang ingin diwujudkan, maka **Visi** Deputy Bidkooor Pollugri adalah

Meningkatkan Kapasitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Dalam Rangka Mendukung Tujuan Nasional di bidang Politik Luar Negeri

Guna mewujudkan visi tersebut, Sekretarias Deputy Bidkooor Pollugri menetapkan **Misi** yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya visi yang telah ditetapkan yaitu :

- a. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;***
- b. Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.***

Tujuan yang ingin dicapai Deputy Bidkooor Pollugri dalam pembangunan bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2018 adalah

- a) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam mendukung tujuan nasional di bidang politik luar negeri;

- b) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- c) Meningkatkan kualitas organisasi dan sumber daya manusia Kedeputan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

2. Strategis Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tersebut maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yaitu:

Tabel 4
Sasaran Strategis dan Indikator Kerja Utama
Deputi BidKoor Pollugri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP
	e. Nilai PMPRB
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB
	e. Nilai PMPRB	31
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4

Adapun penjelasan pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 6
Penjelasan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
1) Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2023 : 91 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; K/L Teknis : Kementerian Luar Negeri Target 2023 : 3,95 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral Target 2023 : 9
2) Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	Perhatian besar pada dokumen perencanaan nasional mencakup isu-isu : 1) Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI; 2) Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional; 3) Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral; 4) Terorisme; 5) Transnational Crime; 6) Perdagangan manusia; 7) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, 8) illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan 9) Keamanan siber.

Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator Kinerja
3) Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputian Bidang Koordinator Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait
4) Nilai SAKIP	Penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam atas pelaksanaan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
5) Nilai PMPRB	Penilaian Mandiri Inspektorat Kemenko Polhukam bersama Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri atas pelaksanaan Sistem Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
6) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	Penilaian atas pelayanan Kesekretariat Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
7) Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	Penilaian Biro Perencanaan dan Organisasi atas pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran di Lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 tersebut diimplementasikan melalui program peningkatan koordinasi bidang Pollugri dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan dan sasaran meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan bidang Pollugri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan melalui:

1. Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
2. Koordinasi kerjasama Amerika Eropa
3. Koordinasi kerjasama ASEAN
4. Koordinasi kerjasama Multilateral
5. Layanan Kesekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Jumlah Anggaran yang dialokasikan dalam rangka mendukung kegiatan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri adalah sebesar Rp13.057.540.000,- (*Tiga Belas Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	a. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional	100%	101,84%	101,84%
	b. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	100%	100%	100%
	c. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti	100%	66,66%	100%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	d. Nilai SAKIP	BB	BB 76,9	100%
	e. Nilai PMPRB	31	31	100%
	f. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputy	4	4	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan II TA 2023

Pencapaian dari sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif**

6. Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional.

Berdasarkan dokumen perencanaan nasional, adapun target pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam dibawah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kedeputan Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, yaitu:

- a. Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri;
- b. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional;
- c. Jumlah Forum Internasional

Tabel 8

Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian 2023
a. Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri	91	93,27	102,49%
b. Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,95	4,07	103,04%
c. Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral	6	6	100%
Rata – rata Realisasi 2023 =			101,84%
Target Capaian 2023 =			100 %
Persentase Capaian 2023 =			101,84 %

a. Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut maka negara juga berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Pelayanan dan perlindungan yang diberikan bagi WNI di luar negeri tetap memperhatikan prinsip bahwa Pemerintah tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI namun tetap mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dan perlindungan yang diberikan bagi WNI di luar negeri dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak pemerintah sehingga perlunya koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak demi menjamin pelayanan dan perlindungan WNI yang negara berikan tetap menjaga hubungan baik luar negeri Indonesia dengan negara lainnya.

Pengukuran Indeks Pelayanan & Perlindungan WNI di Luar Negeri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dengan capaian tahun 2023 adalah 93,27. Persentase capaian tahun 2023 adalah 102,49% dari target 91.

Kemenko Polhukam tidak secara langsung berkontribusi dalam pengukuran dan penghitungan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI namun melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI. Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri, Pelayanan dan Perlindungan WNI diperoleh berdasarkan koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Pengukuran capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dihitung melalui 4 (empat) indikator dengan capaian tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 9
Capaian Indikator pada Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI Tahun 2023

Kode	Uraian Sub Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023
Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di LN		91	93,27	102,49
C1.1	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	83	92,02	110,87
B1.1	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	97	100,00	103,09
B1.2	Indeks Diplomasi Perlindungan WNI di luar negeri	96	106,00	110,42
B1.3	Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	98.4	66,38	67,46

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 (tiga) Sub Indikator yang mencapai target dan 1 (satu) Sub Indikator yang tidak mencapai target pada tahun 2023. Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

merupakan Sub Indikator dengan capaian realisasi tertinggi. Hal ini didorong melalui berbagai kebijakan strategis Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi WNI di Luar Negeri. Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri tidak mencapai target tahun 2023. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa konsep perjanjian kerja sama antara Kemlu dengan K/L/I yang masih dalam proses pembahasan sampai akhir tahun 2023.

Penyelesaian kasus pelindungan WNI di Luar Negeri pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023, baik yang diberikan oleh Perwakilan Kementerian Luar Negeri di luar negeri maupun K/L di dalam negeri, sejumlah 50.349 kasus dari 53.598 kasus. Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 10
Capaian Jenis Penyelesaian kasus pelindungan WNI di Luar Negeri Tahun 2023

Jenis Penyelesaian kasus pelindungan WNI di LN	Jumlah	Terselesaikan
Kasus Khusus	6.116	5.507
Kasus Umum	47.483	44.842
Jumlah	50.349	53.509

Sampai dengan 31 Desember 2023, sebanyak 50.349 kasus telah diselesaikan melalui program dan kegiatan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. Data tersebut diperoleh dari penyelesaian kasus-kasus WNI bermasalah di luar negeri (pembebasan sandera, repatriasi ABK dan PMI, pemulangan WNI Sakit, pemulangan jenazah), penanganan Penyelesaian Kasus WNI di dalam negeri untuk penyelesaian kasus WNI di luar negeri (*family engagement*, pengurusan dokumen, pendampingan PMI), peningkatan Kapasitas dalam Pelayanan Kekonsuleran di Perwakilan RI, pelatihan Aparatur terkait Pelayanan dan Pelindungan WNI, dan sosialisasi Penyadaran Publik.



Gambar 2

Rapat Koordinasi dan Diskusi Publik Pencegahan TPPO Khususnya pada Sektor Judi Online, Online Scam, dan Upaya Pelindungan WNI di Luar Negeri pada 4 Oktober 2023 di Manado, Sulawesi Utara.



Gambar 3

Rapat Koordinasi dan Diskusi Publik Pencegahan TPPO Khususnya pada Sektor Judi Online, Online Scam, dan Upaya Pelindungan WNI di Luar Negeri pada 20 November 2023 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Setiap tahunnya Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan pemberian layanan dan pelindungan WNI di laur negeri. Berikut perbandingan capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI Tahun 2019 – 2023.

Tabel 11
Perbandingan Capaian Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI Tahun 2019–2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Target	83,68	86	87	100	91
Realisasi	89,91	88,35	92,61	93,80	73,92
Capaian	107,45%	102,73%	106,44%	104,22%	81,23%

Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target antara lain antara lain proses *recovery* setelah masa pandemi Covid-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung menimbulkan resesi global, terutama isu sumber daya energi, pada beberapa negara yang terdampak. Jumlah SDM yang menangani perlindungan WNI di luar negeri yang tidak sebanding dengan peningkatan kasus *online scamming* dan TPPO tahun 2023 juga menjadi tantangan dalam pemberian perlindungan kepada WNI di luar negeri tahun 2023.

Deputi Bidkooor Pollugri Kemenko Polhukam terus melakukan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian agar target Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di LN tahun 2023 dapat tercapai. Koordinasi yang dilakukan Deputi Bidkooor Pollugri Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan Kemenlu antara lain :

- 1) Pembaruan MoU Pelayanan dan Pelindungan WNI
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi MoU 5 K/L (Kemlu, Kemendagri, KemenkumHAM, BP2MI, Kemenag) tentang Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri
- 3) Koordinasi penyelesaian kasus WNI-bermasalah yang terdampak kasus TPPO, *online scamming* dan terorisme di luar negeri.

Dapat diprediksikan WNI akan terus mengalami berbagai masalah ketenagakerjaan, keimigrasian maupun masalah lainnya akibat dari kontraksi ekonomi dan sosial tersebut. Apabila kegiatan perlindungan WNI di luar negeri dan upaya menghadapi tantangan penyelesaian kasus dapat terus dilaksanakan, target peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI pada tahun 2023 akan dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan strategi penyeimbang selain penanganan kasus yang tepat dan berpihak, yaitu upaya prevensi dengan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari masalah di luar negeri, penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan perlindungan, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan dan perlindungan dan penguatan diplomasi perlindungan.

b. Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional;

Citra merupakan salah satu hasil dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif merupakan kesimpulan yang diharapkan guna meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Melalui citra positif diharapkan kepercayaan dunia internasional kepada bangsa Indonesia dapat meningkat yang kiranya dapat mendukung penyelenggaraan diplomasi dan kerja sama internasional untuk mencapai kepentingan nasional.

Pentingnya citra positif bagi Indonesia, selain sebagai kebanggaan identitas nasional juga sebagai kekuatan Indonesia menghadapi daya saing global. Citra Indonesia yang positif di mata dunia internasional pada akhirnya dapat digunakan sebagai diplomasi soft power dalam menjalin hubungan dan kerja sama dengan negara-negara sahabat.



Gambar 4
Hasil Pengukuran Survei pada Aplikasi Database Citra Indonesia di Luar Negeri tahun 2023

Capaian indikator Indeks Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023 adalah 4,07 dengan persentase capaian 103,04% dari target 3,95. Survei menggunakan skala *Likert* (skala 1-5) dan terdiri dari pertanyaan mengenai tiga dimensi yaitu:

1. *Tourism and Socio Culture*, yakni mengukur ketertarikan publik untuk mengunjungi Indonesia baik untuk wisata alam, menonton atraksi atau program pariwisata maupun untuk melihat budaya warisan maupun kontemporer Indonesia,
2. *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang “*Competency dan Fairness*” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, dan

3. *Economy* yakni mengukur opini publik tentang citra produk dan jasa yang dihasilkan Indonesia serta pandangan mereka tentang kualitas hidup dan lingkungan bisnis di Indonesia.

Hasil Pengukuran 3 Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional periode triwulan tahun 2023 sebagai berikut .

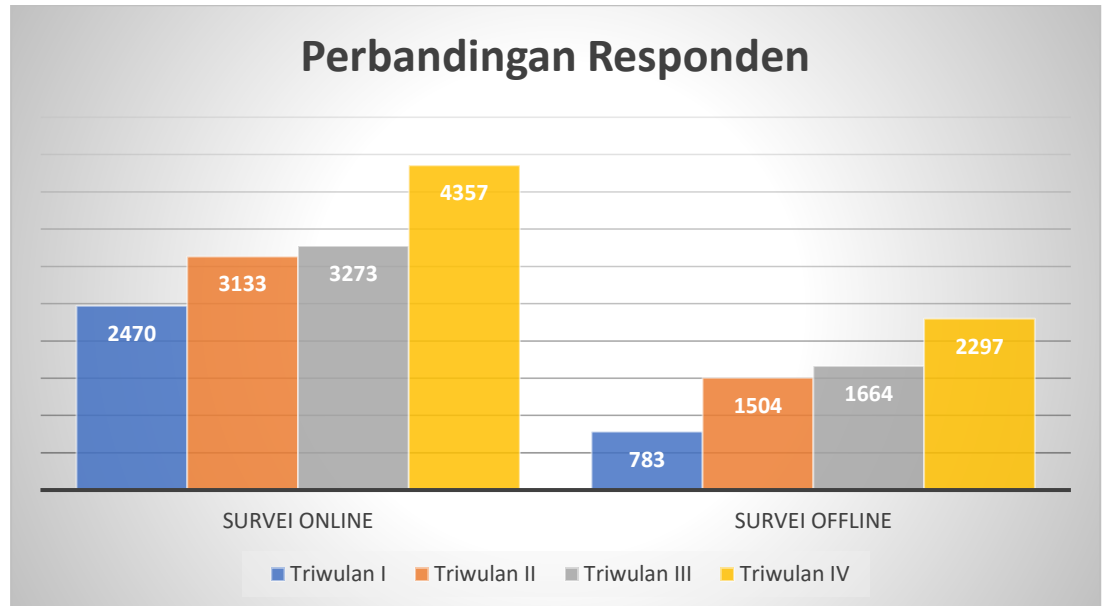
Tabel 12
Capaian Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2023

IKU	Sub IKU	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
		TW I	TW II	TW III	TW IV
Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional					
1	Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya	4,45	4,44	4,43	4,43
2	Dimensi Ekonomi	3,77	3,78	3,81	3,82
3	Dimensi Pemerintahan dan Penegakkan Hukum	3,91	3,91	3,94	3,95

Dari hasil Pengukuran 3 Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional periode triwulan tahun 2023 diperoleh bahwa Dimensi Pariwisata dan Sosial-Budaya memperoleh nilai korespondensi tertinggi dengan nilai 4,43. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dan kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan Indonesia yang dapat digunakan secara maksimal dalam meningkatkan citra positif Indonesia. Pada dimensi *governance and rule of law*, responden memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dimensi ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin baiknya tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia, serta meningkatnya citra Indonesia sebagai negara demokratis dan negara yang responsif terhadap isu-isu global seperti pemberantasan terorisme, penegakkan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Persepsi responden pada dimensi ekonomi Indonesia masih perlu ditingkatkan seperti mempromosikan produk Indonesia di negara-negara sahabat yang menjadi salah satu parameter dimensi ekonomi.

Penghitungan target Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional diukur melalui survei yang dilakukan oleh 127 (seratus dua puluh tujuh) Perwakilan RI di luar negeri, tidak termasuk 3 (tiga) Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI), dengan menyasar masyarakat asing non-WNI di luar negeri. Masyarakat asing tersebut dapat terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum setempat, pemerintah setempat, parlemen, media, akademisi, LSM, serta counterpart terkait lainnya. Tahun 2023 fitur pilihan bahasa asing pada survei daring ditambah dari 6 Bahasa (2022) menjadi 26 Bahasa (2023).

Survei Citra Indonesia di Dunia Internasional terdiri dari 13.233 responden survei daring dan 6.248 responden survei luring kepada WNA yang hadir saat kegiatan yang diselenggarakan online Perwakilan RI di luar negeri. Perbandingan total responden adalah sebagai berikut.



Grafik 1
Perbandingan Total Responden Tahun 2023

Kemenko Polhukam tidak langsung berkontribusi kepada pengukuran dan penghitungan citra Indonesia di dunia internasional namun melalui koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, Kemenko Polhukam berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023, hal tersebut dilakukan melalui peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* yakni mengukur opini publik tentang “*Competency dan Fairness*” termasuk komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Isu global yang ditangani Kemenko Polhukam dalam rangka optimalisasi politik luar negeri antara lain terkait penanggulangan terorisme (*Foreign Terrorist Fighters*), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan.

1. Pemberantasan Terorisme

- a. Terorisme masih menjadi ancaman laten, baik yang bermotif ideologi, politik, dan konflik horizontal antara Indonesia dengan Australia sehingga membutuhkan kerja sama kedua negara di berbagai tingkatan. Di kawasan Asia Tenggara, terorisme dan radikalisme masih akan menjadi ancaman serius. Berbagai kelompok teror afiliasi ISIS dan Al Qaeda yang tetap berpotensi mengganggu stabilitas. Dalam rangka menanggulangi dan memberantas terorisme, Menko Polhukam menindak lanjuti kolaborasi antara Indonesia-Australia dalam pertemuan the 9th

Australia-Indonesia *Ministerial Council Meeting* (MCM) di Melbourne, Australia. Pembahasan pertemuan menyepakati kerja sama dan sikap kedua negara terkait *counter terrorism*, kekerasan berbasis ekstrimisme, misinformasi, disinformasi, *cyber security* dan *maritime security*. RI-Australia telah berkolaborasi dengan baik dalam upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan melalui berbagai mekanisme kerja sama, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Khusus di tingkat kerja sama sub-kawasan, Indonesia-Australia memimpin bersama pertemuan *Sub-Regional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Security* (SRM) di tingkat menteri, dan pertemuan *Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum* (SOCTPF) di tingkat pejabat senior. Negara peserta SRM adalah Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, New Zealand, Filipina, Singapura, Thailand.



Gambar 5
13 Maret 2023, Menko Polhukam bersama memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia *Ministerial Council Meeting* (MCM) di Melbourne, Australia. Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil.

- b. *Sub Regional Meeting* merupakan forum internasional multilateral yang memberikan kesempatan negara-negara peserta untuk saling berdiskusi, belajar, bertukar praktik dan bertukar informasi penting terhadap isu-isu global seperti keamanan regional dan global; penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan; kejahatan siber; dan *online scamming*/penipuan online. Selain dengan Australia, Menko Polhukam juga bekerja sama 6 (enam) negara lainnya dalam hal pemberantasan terorisme yaitu Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand. Kerja sama ini dinyatakan melalui pertemuan Sub Regional Meeting Tahun 2023 di Melbourne, Australia. Hal yang paling banyak dibahas pada pertemuan tersebut adalah strategi bekerja sama 8 negara dalam penanganan FTF (*freedom terrorist fighter*) yang berada di kamp-kamp pengungsi di

Suriah. Negara-negara SRM bersepakat untuk memperkuat kerja sama penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara.



Gambar 6

pertemuan Sub Regional Meeting Tahun 2023 di Melbourne, Australia di Melbourne, Australia tanggal 15 Maret 2023.

- c. Delegasi Indonesia yang dipimpin Deputy Bidkooor Pollugri Pollugri Kemenko *Polhukam* menghadiri Pertemuan ke-3 *Senior Officials Counter Terrorism Policy Forum* di Sydney, Australia. *Policy Forum*, yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2021, kali ini secara khusus membahas tentang penanggulangan penyalahgunaan Internet untuk kegiatan terorisme. Pertemuan dihadiri negara-negara like-minded lainnya di kawasan, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, dan Thailand.



Gambar 7
Pertemuan ke-3
Senior Officials Counter Terrorism Policy Forum di Sydney, Australia tanggal 15-16 November 2023.

2. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Berdasarkan data *Trafficking in Persons Report July 2022* yang dirilis oleh *Department of States* Amerika Serikat, Indonesia dikategorikan dalam *Tier 2* penanganan TPPO. Hal ini karena tidak memenuhi standar minimum untuk pemberantasan TPPO, meskipun sebenarnya telah menunjukkan upaya signifikan dalam hal tersebut. Indonesia memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang pada intinya mendefinisikan TPPO sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan ancaman yang bertujuan untuk eksploitasi korban dan dilakukan di dalam maupun antar negara. UU PTPPO tersebut memiliki beberapa tantangan terkait kerangka pengaturan hukum TPPO dan kerangka hukum mengenai bentuk eksploitasi TPPO.

Tantangan tersebut antara lain terkait cakupan definisi, lokus, dan rumusan delik pasal terkait TPPO dan bentuk eksploitasi TPPO. Dengan mempertimbangkan TPPO merupakan kejahatan lintas batas negara, maka diperlukan kerja sama dengan negara lain untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional di kawasan. Salah satunya melalui kerja sama konkret antar pemangku kepentingan di ASEAN agar pemberantasan TPPO dapat berjalan dengan efektif.

Dalam rangka memberantas TPPO, Menko Polhukam (Selaku Ketua II Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang) turut aktif dalam menyelesaikan kasus perdagangan dan penculikan WNI di luar negeri. Komitmen Kemenko Polhukam tersebut dinyatakan dalam forum internasional salah satunya pada forum ASEAN tahun 2023 sebagai berikut.

- a. Saat memimpin pertemuan ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN, Menko Polhukam Mahfud menyampaikan deklarasi komitmen bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Selaku koordinator dan penanggung jawab Pilar Politik dan Keamanan ASEAN, Menko Polhukam mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk meningkatkan upaya memerangi maraknya kejahatan transnasional di ASEAN seperti terorisme, narkoba, dan terutama perdagangan orang.



Gambar 8
Kehadiran Menko Polhukam pada pertemuan APCS ke-26 pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo.

- b. Komitmen terhadap pemberantasan kejahatan transnasional khususnya TPPO ditegaskan kembali oleh Menko Polhukam pada sidang ke-27 ASEAN *Political Security Community Council* (APSC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh para Menlu negara anggota ASEAN mengangkat dua agenda utama, yaitu review kemajuan kerja sama badan sektoral Pilar Masyarakat Polkam ASEAN dan kemajuan implementasi Cetak Biru Pilar Masyarakat Polkam ASEAN 2025.

Menko Polhukam menekankan masih belum adanya kemajuan signifikan implementasi 5 Poin Kesepakatan oleh junta militer Myanmar yang menghambat kerja sama ASEAN secara keseluruhan dan peningkatan kasus TPPO di kawasan ASEAN. Para negara ASEAN harus bersepakat untuk memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban, hal ini sejalan dengan ASEAN Leaders Declaration Combatting Trafficking in Persons yang disepakati pada KTT di Labuan Bajo Mei 2023 lalu.

Menko Polhukam terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi terurama dengan Satuan Tugas (Satgas) TPPO untuk terus bergerak mengusut kasus perdagangan orang. Hingga Juni 2023 jumlah korban TPPO yang berhasil diselamatkan oleh Satgas TPPO sebanyak 1.596 orang dan meringkus 552 tersangka. Empat modus yang digunakan dalam kasus perdagangan orang diantaranya ialah pekerja migran Indonesia (PMI), anak buah kapal (ABK), pekerja seks komersial (PSK), dan eksploitasi anak.



Gambar 9
kehadiran Menko Polhukam pada pertemuan APCS ke-27 pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.

3. Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan

Menko Polhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerjasama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki, yang berlangsung di Ankara pada hari Rabu, 23 Agustus 2023. Kerjasama tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penandatanganan menandakan disepakatinya mekanisme bilateral berupa *Security Dialogue Meeting* antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki. *Security Dialogue Meeting* merupakan sarana dalam mengkaji perkembangan kerja sama keamanan, pada bidang penanganan kejahatan transnasional, *capacity building*, penegakan hukum, penanganan isu terorisme, TPPO, *money laundering* pendanaan kegiatan terorisme, dan kerja sama kepolisian.



Gambar 10

Menko Polhukam RI, Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerjasama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki pada 23 Agustus 2023.

Selain pernyataan sikap Kemenko Polhukam atas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu-isu global, peningkatan capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional juga didukung dengan menjalin hubungan antar negara-negara sahabat. Silaturahmi antar negara dilakukan sebagai bagian *soft diplomacy* dalam upaya peningkatan kerja sama dalam penanganan isu global bidang keamanan.

Berikut kegiatan Menko Polhukam sebagai pendukung capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2023.

1. Dalam hubungan bilateral dengan Singapura, sebagai negara tetangga terdekat, Singapura merupakan mitra paling strategis bagi Indonesia dan terbesar di ASEAN baik dalam bidang ekonomi maupun keamanan lintas batas negara. Kedekatan Singapura dan Indonesia terlihat dari tingginya frekuensi kunjungan para pemimpin dan pejabat tinggi antar negara. Menko Polhukam menerima kunjungan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Yang Mulia Teo Chee Hean, di kantor Kemenko Polhukam. Pada pertemuan tersebut dibahas peningkatan kerja sama antara Indonesia-Singapura dalam bidang keamanan antara lain tindak lanjut Perjanjian kesepakatan *Flight Information Region* (FIR) antara Indonesia dengan Singapura.



Gambar 11
Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura, Yang Mulia Teo Chee Hean, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada 1 Maret 2023.

2. Hubungan diplomatik RI-Kerajaan Arab Saudi dimulai pada 1 Mei 1950 yang ditandai dengan pembukaan Perwakilan RI di Jeddah. Pada 1964, Perwakilan RI di Jeddah tersebut berubah status menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Arab Saudi merupakan satu dari tujuh negara Arab yang memberi pengakuan atas proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 4 November 1947. Kerja sama kedua negara berlangsung dengan baik, baik bilateral, maupun dalam forum internasional seperti PBB, G20, OKI, dan GNB. Menko Polhukam menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi. Menko Polhukam membahas peningkatan pelayanan jamaah haji asal Indonesia, penanganan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, dan kelanjutan berbagai bentuk kerjasama bidang keamanan antara RI-Kerajaan Arab Saudi.



Gambar 12
Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Yang Mulia Faisal Abdullah H. Amodi tanggal 28 Maret 2023 di kantor Kemenko Polhukam.

3. Hubungan diplomatik Indonesia dan RRT telah terjalin sejak tahun 1950 dan pada tahun 2023 memasuki peringatan hubungan diplomatik RI-RRT ke-73. RRT merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan dan hubungan strategis ini terus terjalin di berbagai level, baik itu bilateral, regional, maupun internasional. Dalam rangka memperingati 1 dekade kemitraan strategis komperhensif RI-RRT Menko Polhukam menerima kunjungan kehormatan State Councilor merangkap Menteri Keamanan Publik RRT, Y.M. Wong Xiaohong di kantor Kemenko Polhukam. Menko Polhukam menekankan pentingnya terus memperdalam dan meningkatkan kerja sama di bidang penegakkan hukum dan keamanan untuk penanganan isu-isu yang menjadi concern bersama, antara lain *online scam*, judi *online* anti-teror dan kerja sama keamanan lainnya.



Gambar 13
Courtesy Meeting Menko Polhukam dengan State Councilor merangkap Menteri Keamanan Publik RRT, Y.M. Wong Xiaohong di kantor Kemenko Polhukam tanggal 1 November 2023.

4. Indonesia dan Korea Selatan memiliki modalitas yang kuat dan unik dalam memajukan kemitraan strategis karena kedua negara memiliki banyak kesamaan nilai seperti demokrasi, ekonomi terbuka, cinta damai, penghormatan pada HAM, dan penegakan hukum internasional. Menko Polhukam menghadiri undangan resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 78 tahun kemerdekaan RI dan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik serta kerjasama RI-Korea di Korea pada 30 Agustus 2023. Kemenko Polhukam mengharapkan agar Indonesia dan Korea dapat terus meningkatkan kerja sama yang

berorientasi masa depan, tidak hanya pada isu-isu global, tapi juga isu-isu bilateral yang menjadi prioritas



Gambar 14
Menko Polhukam menghadiri resepsi diplomatik dalam rangka peringatan 78 tahun kemerdekaan RI dan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik serta kerjasama RI-Korea.

5. Sebagai dua negara yang bertetangga, Indonesia dan Malaysia bahkan sering disebut negara serumpun sehingga memiliki potensi kerja sama antar dua negara yang besar. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama bidang keamanan, Deputy Bidkooor Pollugri Menerima *Courtesy Call Director-General, National Security Council of Malaysia* tanggal 16 Agustus 2023 di Kemenko Polhukam.



Gambar 15
Deputy Bidkooor Pollugri Menerima *Courtesy Call Director-General, National Security Council of Malaysia* tanggal 16 Agustus 2023 di Kemenko Polhukam

Target Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan 3,95 (kategori baik) dan terealisasi sebesar 4,07 (kategori baik) dengan capaian sebesar 103,04%. Capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional tahun 2020 sampai 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 13
Capaian Dimensi Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2023

Tahun	2020			2021			2022			2023		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,80	3,82	100,53%	3,85	3,95	103,37%	3,90	4,06	104,10%	3,95	4,07	103,04%

Realisasi dan persentase capaian Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional memiliki tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2023. Pada tahun 2022, Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional memiliki realisasi dan capaian yang paling besar dalam periode tiga tahun terakhir, yaitu dengan realisasi sebesar 4,06 dari skala 5 dan persentase capaian sebesar 104,10%. Tren peningkatan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya pemulihan ekonomi dan pelonggaran pembatasan terkait pandemi Covid-19, peningkatan hubungan kerja sama bidang keamanan baik bilateral, regional maupun multilateral serta iklim politik dan penegakkan hukum dalam negeri Indonesia yang cenderung stabil.

Secara umum, peningkatan indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional terutama pada dimensi Pemerintahan dan Penegakkan Hukum masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan, yaitu:

1. belum maksimalnya pemberian informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri. Hal ini dikarenakan pengisian kuisisioner biasanya dilakukan pada saat acara festival kebudayaan dan festival ekonomi di luar negeri.
2. belum maksimalnya pemberian informasi terkait kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan informasi terkait komitmen Indonesia terhadap isu-isu global serta opini publik tentang prinsip hukum yang berlaku di Indonesia pada WNA di luar negeri pada acara-acara yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri,
2. Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan kegiatan bidang keamanan yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan bilateral, regional dan multilateral antar negara kepada WNA di luar negeri melalui pemberitaan baik pada media cetak, media elektronik maupun media sosial negara tersebut maupun perwakilan Indonesia di luar negeri, dan

3. Menyampaikan usulan untuk dapat mensosialisasikan atau melakukan pengisian kuisisioner Indeks Citra pada saat pelaksanaan kegiatan Menko Polhukam bidang Keamanan di luar negeri.

c. Jumlah Forum Internasional Yang Dipimpin oleh Menko Polhukam

Kepemimpinan pada forum regional dan multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan serta peran Indonesia/WNI pada suatu jabatan strategis di perserikatan/forum multilateral dimana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk ikut serta menyusun kebijakan multilateral, menyusun dan melaksanakan program-program kerja multilateral yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia.

Penghitungan capaian Jumlah Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral meliputi peran Kemenko Polhukam dalam memimpin atau mengarahkan pada forum regional dan multilateral, misalnya sebagai *chair*, *co-chair*, *host*, *co-host*, *member of bureau*, dan keberhasilan pencalonan Indonesia pada Multilateral.



Gambar 16
ASEAN wafe yang dilakukan oleh pemimpin delegasi pada Forum ASEAN *Political Security Council* ke-26 pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo.

6 (enam) Forum Internasional yang Dipimpin Menko Polhukam pada tingkat Bilateral, Regional dan Multilateral yang telah dilaksanakan tahun 2023:

1. 9th Australia-Indonesia *Ministerial Council Meeting* (MCM) di Melbourne, Australia,
2. 4th *Sub Regional Meeting* (SRM) on *Counter Terrorism and Transnational Security*, di Melbourne, Australia,
3. ASEAN *Political Security Community Council* (APSC Council) ke-26 pada KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, NTT,
4. ASEAN *Political Security Community Council* (APSC Council) ke-27 pada KTT ASEAN Ke-43 di Jakarta,
5. *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* Indonesia-Türkiye, di Türkiye,
6. 3rd *Senior Official Meeting on Counter Terrorism Policy Forum* di Australia,

Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai pimpinan (baik Host, Co-Host, Chair, Co-Chair maupun dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Multilateral) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara lain berupa:

Forum Kerja Sama Bilateral

- 1) Menko Polhukam bersama Deputi Bidkooor Pollugri memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil. Pertemuan Ministerial Council Meeting RI-Australia merupakan forum *high level dialogue* (HLD) tahunan tingkat Menteri Koordinator antara Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Australia untuk membahas isu-isu hukum dan keamanan yang menjadi concern Australia dan Indonesia, antara lain penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional termasuk penanganan kejahatan terhadap anak, keamanan siber, keamanan maritim, penegakan hukum, dan penindakan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Forum ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 dan dilaksanakan secara bergantian oleh kedua negara dengan outcome document berupa *Joint Communique*.

Pertemuan ini bagian dari komitmen Kemenko Polhukam untuk mendukung peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global melalui sinergi Kementerian/Lembaga dalam partisipasi aktif di forum kerja sama dengan negara mitra, khususnya Australia.

Gambar 17
14 Maret 2023, Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Siber Australia, Clare O'Neil memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia *Ministerial Council Meeting* (MCM) di Melbourne, Australia.



- 2) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerjasama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki, yang berlangsung di Ankara pada 23 Agustus 2023. Kerja sama tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Turki, khususnya di bidang politik, hukum, dan keamanan. Penandatanganan naskah perjanjian bidang keamanan ini juga menandakan disepakatinya mekanisme bilateral berupa *Security Dialogue Meeting* antara Menko Polhukam RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Turki. *Security Dialogue* pertama yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2024.



2023.

Gambar 18
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menandatangani perjanjian kerjasama keamanan atau *Agreement on Joint Cooperation on Security Issues* antara Indonesia dengan Turki di Ankara tanggal 23 Agustus



Gambar 19

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya pada Pertemuan Bidang Keamanan Indonesia-Turki di Ankara tanggal 23 Agustus 2023.

Forum Kerja Sama Regional

- 3) Menko Polhukam, selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, berperan sebagai Ketua Delri dan Wakil Indonesia pada Pertemuan ASEAN *Political Security Community Council* (APSC Council) ke-26 pada KTT ASEAN Ke-42 di Labuan Bajo, NTT. Dalam rangka memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Menko Polhukam (juga Selaku Ketua II Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang) turut aktif dalam menyelesaikan kasus perdagangan dan penculikan WNI di luar negeri.



Gambar 20
pertemuan APCS KE-26 pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo

- 4) Menko Polhukam, selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN, berperan sebagai Ketua Delri dan Wakil Indonesia pada Pertemuan ASEAN *Political Security Community Council* (APSC Council) ke-27 pada KTT ASEAN Ke-43 di Jakarta. Pertemuan yang diikuti oleh para Menlu negara anggota ASEAN mengangkat dua agenda utama, yaitu review kemajuan kerja sama badan sektoral Pilar Masyarakat Polkam ASEAN dan kemajuan implementasi Cetak Biru Pilar Masyarakat Polkam ASEAN 2025. Menko Polhukam menekankan masih belum adanya kemajuan signifikan implementasi 5 Poin Kesepakatan oleh junta militer Myanmar yang menghambat kerja sama ASEAN secara keseluruhan dan peningkatan kasus TPPO di kawasan ASEAN. Para negara ASEAN harus bersepakat untuk memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban, hal ini sejalan dengan ASEAN Leaders Declaration Combatting Trafficking in Persons yang disepakati pada KTT di Labuan Bajo Mei 2023 lalu.



Gambar 21
Pertemuan APCS KE-27 pada KTT ke-43 ASEAN di Jakarta

Forum Kerja Sama Multilateral

- 5) Pertemuan *Sub Regional Meeting* (SRM) on *Counter Terrorism and Transnational Security* merupakan forum dialog hukum dan keamanan tingkat Menteri Koordinator antar negara di sub-kawasan Asia dan Pasifik yang dilaksanakan dalam rangka membahas isu keamanan nasional yang menjadi *concern* bersama negara-negara peserta, antara lain penanggulangan terorisme dan kejahatan transnasional, keamanan siber, penegakan hukum, dan penindakan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pertemuan MCM ini digagas oleh Kemenko Polhukam RI dan Kemnetrian Dalam Negeri dan Cyber Australia dengan tujuan

meningkatkan kerja sama negara-negara sub-kawasan dalam merespons tantangan keamanan internasional yang berkembang setiap tahunnya. Pertemuan dipimpin bersama (*co-chairs*) oleh Menko Polhukam dan Mendagri Australia yg diselenggarakan secara bergantian di negara *co-chairs* dengan *outcome* document berupa *Joint Statement*.



Gambar 22

Menko Polhukam bersama Deputy Bidkooor Pollugri memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan the 9th Australia-Indonesia Ministerial Council Meeting (MCM) di Melbourne, Australia.

Pebahasan pertemuan menyepakati kerja sama dan sikap kedua negara terkait *counter terrorism*, kekerasan berbasis ekstrimisme, misinformasi, disinformasi, *cyber security* dan *maritime security*.



Gambar 23

Pertemuan Sub Regional Meeting Tahun 2023 di Melbourne, Australia di Melbourne, Australia.

Secara umum, tidak terdapat kendala/habatan berarti dalam Forum Internasional Yang Dipimpin oleh Menko Polhukam tahun 2023. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Forum Internasional Yang Dipimpin oleh Menko Polhukam selama tahun 2023 antara lain :

1. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung sehingga belum dapat diselenggarakannya Forum Bidang Keamanan RI-Rusia

(Pertemuan dipimpin oleh Menko Polhukam dan Kepala Dewan Keamanan Rusia) sejak tahun 2021.

2. Pertemuan bidang keamanan RI-Turkiye (Pertemuan dipimpin oleh Menko Polhukam dan Menteri Dalam Negeri Turkiye) tertunda hingga Triwulan III Tahun 2023. Kemenko Polhukam menunggu kabinet pemerintahan baru Turkiye sebagai hasil Penyelenggaraan Pemilihan umum presiden dan parlemen di Turkiye diselenggarakan pada 14 Mei 2023.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Meninjau kembali Kerja Sama Bidang Keamanan RI-Rusia tahun 2024.
2. Menyusun rencana pertemuan Forum Internasional Yang Dipimpin oleh Menko Polhukam tahun 2024 dengan memperhatikan kondusifitas pemerintahan negara *counter-part* Kemenko Polhukam.

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional.

$$= \frac{\text{Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kedeputian Pollugri}}$$

$$= \frac{18}{18}$$

Capaian = 100%

Selama tahun 2023 Kedeputian Bidkooor Pollugri telah menghasilkan 18 (Delapan Belas) Rekomendasi kebijakan bidang Pollugri yang mendukung dokumen perencanaan nasional. Berikut tabel yang menjelaskan 4 (empat) bidang kerja sama rekomendasi tahun 2023.

Tabel 14

Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Rekomendasi yg dihasilkan	Capaian 2023	% Capaian 2023
Rekomendasi Kedeputian Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	18	18	100,00%

1) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Asia, Pasific dan Afrika	5	5	100,00%
2) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Kerja Sama Amerop	4	4	100,00%
3) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Kerja Sama Kerja Sama ASEAN	6	6	100,00%
4) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Kerja Sama Kerja Sama Miltilateral	3	3	100,00%

18 (Delapan Belas) Rekomendasi kebijakan bidang Pollugri tersebut mendukung dokumen perencanaan nasional, yaitu :

a. Mendukung Indeks Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:

- 1) Rekomendasi dalam rangka Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri, yaitu:
 - a) Surat Deputy Bidkooor Pollugri nomor R-24 dan R-25/LN.00.00/2/2023 tgl 17 Februari 2023 kepada Kemlu, Kemkumham, Kemos, BAIS TNI, Densus 88AT Polri, BIN, BNPT, dan pihak Bandara Soetta terkait penyelesaian kasus WNI-b terkait terorisme di Filipina.
 - b) Surat Menko Polhukam nomor R-11/LN.00.00/3/2023 tgl 31 Maret 2023 kepada Menlu, Menkumham, Mensos, Panglima TNI, Kapolri, KaBIN, dan Ka BNPT, dengan tembusan kepada Presiden RI, Wapres RI, Mensesneg, dan Seskab terkait Penanganan Kasus WNI-b terkait Terorisme di Afghanistan.
- 2) Rekomendasi dalam rangka Penguatan Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO, Khususnya Terhadap PMI Non-Prosedural, yaitu:
 - a) Surat Deputy Bidkooor Pollugri nomor B-669/LN.00.00/2/2023 tgl 28 Februari 2023 kepada Kemdagri, Kemlu, Kemhub, Kemkumham, Kemnaker, Kemdikbudristek, Kemkominfo, Kemdesa-PDPT, Kejagung, TNI, Polri, BIN, BP2MI dan PPATK dengan tembusan kepada Menko Polhukam, Deputy III dan V Kemenko Polhukam, dan KPPPA berupa Langkah-Langkah Konkret Pencegahan dan Penegakan Hukum TPPO Terhadap PMI Non-Prosedural di Luar Negeri.
 - b) Surat Menko Polhukam nomor B-89/LN.00.00/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Kapolri dengan tembusan kepada Presiden RI, Menko PMK, Menpan-RB, MenPPPA, dan Men-PPN/Ka Bappenas dalam rangka Rekomendasi Pembentukan Direktorat Khusus TPPO pada Kepolisian Negara RI.
 - c) Surat Menko Polhukam nomor B-100/LN.00.00/5/2023 tanggal 30 Mei 2023 kepada Men-PPN/Ka Bappenas dengan tembusan



- kepada 25 K/L anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) sesuai Perpres 22/2021 terkait Rekomendasi Dorongan Kepada K/L Anggota GT PP TPPO Untuk Memprioritaskan Pecegahan dan Penanganan TPPO
- 3) Surat Menko Polhukam Nomor B-31/LN.00.01/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 ditujukan kepada Wakil Presiden RI dengan tembusan kepada Menlu, Menkeu, Mendagri, Menristekdikti, Kepala BIN, Plh. Gubernur Provinsi Papua, dan Duta Besar RI Washinton, D.C. sebagai Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Studi Mahasiswa Indonesia Penerima Beasiswa Pemprov Papua di Colorado State University, Amerika Serikat.
- b. Mendukung Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia Internasional. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- 1) Surat Deputy Bidkooor Pollugri Kemenko Polhukam nomor B-1076/LN.00.00/3/2023 tanggal 21 Maret 2023, kepada Kemlu, Kemkumham, Kemsos, Kemhub, Kemkominfo, KKP, Kemnaker, Polri, BIN, BNPT, BSSN, Bakamla, BP2MI terkait hasil pertemuan MCM dan SRM yang menyepakati kerja sama dan sikap Indonesia-Australia dan negara di kawasan Sub Regional ASIA dalam memerangi dan menangani *counter terrorism*, kekerasan berbasis ekstrimisme, misinformasi, disinformasi, *cyber security* dan *maritime security*.
 - 2) Rekomendasi Penanganan Kepesertaan Israel pada FIFA U-20 World Cup 2023 melalui Surat Deputy Bidkooor Pollugri Nomor B-742/LN.00.03/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 kepada Asintel Panglima TNI, Asops Panglima TNI, Kepala Pusat Penerangan TNI, Kepala BAIS TNI, dan K/L terkait. Tembusan: Menko PMK, Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam.
 - 3) Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional Tahun 2023 melalui Surat Deputy Bidkooor Pollugri Nomor B-1691/LN.00.03/06/2023 tanggal 5 September 2023 kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta K/L terkait. Tembusan: Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam.
 - 4) Rekomendasi Mengenai Tata Kelola Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional melalui Surat Deputy Bidkooor Pollugri Nomor B-1830/LN.00.03/06/2023 tanggal 13 September 2023 kepada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta K/L terkait. Tembusan: Menko Polhukam, Sesmenko Polhukam.
 - 5) Rekomendasi mengenai Pemasangan Alat Telekomunikasi VSAT Earth Station "Sapfir" di Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta melalui Surat Deputy Bidkooor Pollugri nomor B-2311/LN.00.01/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 kepada Direktur

Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu dengan tembusan kepada Dir. Eropa II Kemlu; Dir. Fasilitas Diplomatik Kemlu; Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kominfo; Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo; dan Dir. 52 BIN.

- 6) Rekomendasi mengenai penyelenggaraan Latihan Bersama ASEX-01 N di Natuna Utara melalui surat Deputy Bidkoo Pollugri Nomor B-2682/LN.00.02/08/2023 meminta kepada Asisten Operasi Panglima TNI tanggal 28 Agustus 2023 untuk menyusun narasi publik mengenai pemindahan lokasi latihan dari Laut Natuna Utara ke Laut Natuna Selatan dengan menekankan pada alasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta lokasi yang lebih layak untuk latihan penanganan bencana alam serta mengantisipasi pemberitaan negatif terkait partisipasi Myanmar pada latihan bersama ASEX-01 N dengan memperkuat narasi dan *press release* kepada media.
- 7) Surat Rekomendasi Deputy Bidkoo Pollugri mengenai Peningkatan Kerja Sama Bidang Keamanan RI-Turki nomor B-3346/LN.00.01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023. Dalam surat tersebut disampaikan 3 (tiga) rekomendasi, yaitu (i) agar Polri dan BNPT dapat segera menyelesaikan pembahasan perjanjian kerja sama dengan pihak Turki yang tertunda; (ii) Kemlu dan BNPT dapat segera mendorong proses pemulangan 5 (lima) WNI-b terasosiasi terorisme dari Turki dengan tetap memperhatikan pertimbangan keamanan dan kesiapan di dalam negeri; dan (iii) BNPB agar dapat segera menyampaikan tanggapan Pemri atas draft MoU dari Lembaga Penanggulangan Bencana Turki (AFAD) terkait kerja sama penanganan bencana.
- 8) Surat Rekomendasi Deputy Bidkoo Pollugri mengenai Pengembangan Potensi Diaspora Indonesia sebagai Masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 nomor B-4149/LN.00.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023. Dalam surat tersebut disampaikan 4 (tiga) rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Kemdagri, Kemlu, Kemkumham, dan Bappenas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu (i) dirumuskannya suatu sistem agar pendataan Diaspora Indonesia dapat dilakukan secara akurat, dan dilakukannya updating data secara berkelanjutan; (ii) perumusan road map pengembangan Diaspora Indonesia dapat dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan; (iii) dilakukan kajian untuk meningkatkan manfaat konkret bagi pemegang KMILN, termasuk mengkaji fungsi KMILN sebagai KTP plus; dan (iv) agar dilaksanakan suatu kajian yang mendalam mengenai isu dwi kewarganegaraan Indonesia.

- 9) Surat Rekomendasi Deputy Bidkoo Pollugri Nomor: B-3819/LN.00.02/11/2023 tanggal 20 November 2023 mengenai dukungan terhadap negosiasi COC. Surat disampaikan kepada Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu. Dalam surat rekomendasi kebijakan disampaikan agar Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu : (1) memulainya proses pengaktifan jalur komunikasi *hotline* Angkatan Laut dan aparat penegak hukum maritim lainnya negara-negara anggota ASEAN dengan pihak RRT guna menghindari terjadi insiden dan konflik di LTS dan (2) mendorong penguatan diplomasi track-3 jalur sains di antara komunitas epistemik dalam bentuk kolaborasi penelitian antar lembaga riset think-tank ASEAN dan RRT untuk memperkuat *confidence building measures* dalam kerangka implementasi praktis *Declaration of Conduct on South China Sea* (DOC).
- c. Mendukung Jumlah Forum Regional dan Multilateral yang dipimpin oleh Indonesia
- Dalam rangka mendukung Indonesia sebagai 1691 pimpinan pada forum internasional, (baik *Host*, *Co-Host*, *Chair*, *Co-Chair* maupun dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota Multilateral) Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam telah menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Kementerian/Lembaga terkait pelayanan, yang dalam hal ini berkaitan dengan isu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain:
- 1) Surat Deputy Bidkoo Pollugri Nomor B-1126/LN.00.02/04/2023 tanggal 12 April 2023 hal Rekomendasi Kebijakan mengenai situasi krisis Myanmar dan Keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Rekomendasi ditujukan kepada Kemlu dan K/L terkait untuk menyamakan posisi nasional terkait keterlibatan Myanmar pada pertemuan politis di ASEAN dan dukungan K/L terhadap keanggotaan Timor Leste di ASEAN.
 - 2) Surat Deputy Bidkoo Pollugri B-1973/LN.00.02/06/2023 Rekomendasi perihal Kebijakan mengenai Pengamanan Infrastruktur Kritis Bawah Laut. Rekomendasi kepada Kemlu dan KKP untuk mendorong terwujudnya kerja sama pengamanan pipa dan kabel bawah laut pada berbagai forum kerja sama ASEAN yang relevan.
 - 3) Surat Menko Polhukam Nomor B-67/LN.00.02/4/2023 kepada Mensesneg, Menlu dan Panglima TNI tanggal 28 April 2023 perihal Rekomendasi Kebijakan Keterlibatan BNPT yang menangani penanggulangan terorisme dalam kegiatan KTT ASEAN Labuan Bajo tahun 2023 guna memperkuat dukungan pengamanan.
 - 4) Surat Rekomendasi Deputy Bidkoo Pollugri Nomor: B-4133/LN.00.02/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 mengenai rencana tindak lanjut hasil-hasil Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 kepada K/L terkait Pilar Masyarakat Polkam ASEAN. Rekomendasi kebijakan yang disampaikan

yaitu : (1) Indonesia kiranya dapat terus mendorong agar ASEAN fokus pada konsolidasi internal dengan mengembangkan strategic space pada mekanisme yang sudah ada untuk menjaga sentralitas, inklusifitas, dan strategic balance, (2) Indonesia kiranya dapat teguh berpedoman pada Keputusan Leaders untuk tidak melibatkan pejabat di Tingkat politis Myanmar pada pertemuan-pertemuan ASEAN dan menghindari partisipasi Delri secara fisik pada pertemuan ASEAN yang diselenggarakan di Myanmar, (3) Indonesia dapat terus melakukan *engagement* dan mendukung Laos sebagai Ketua ASEAN 2024 guna menjaga kesinambungan pembahasan isu-isu kemaritiman dan politik, utamanya pada mekanisme AMF/EAMF, pembentukan ACF, AMO, dan negosiasi COC.

Capaian rekomendasi kebijakan Bidang Pollugri yang mendukung dokumen perencanaan nasional tahun 2023 sebanyak 18 rekomendasi dengan rincian pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada tabel berikut.

Tabel 15

Rincian Capaian Rekomendasi Kedepuitan Pollugri per bidang pembangunan bidang Politik Luar Negeri pada dokumen perencanaan nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Jumlah Rekomendasi yg dihasilkan	Capaian 2023	% Capaian 2023
Rekomendasi Kedepuitan Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	18	18	100,00%
1) Mendukung Indeks Perlindungan WNI di Luar Negeri	5	5	100,00%
2) Mendukung Indeks Citra Positif Indonesia di mata dunia Internasional	9	9	100,00%
3) mendukung Jumlah Forum Yang Dipimpin oleh Indonesia Pada Forum Regional dan Multilateral	4	4	100,00%

Secara umum, tidak terdapat kendala/habatan berarti dalam penyusunan rekomendasi yang mendukung pembangunan nasional bidang politik luar negeri yang sesuai dokumen perencanaan nasional pada tahun 2023. Adapun tantangan yang dihadapi selama tahun 2023 antara lain :

1. Kurangnya *update* informasi dari K/L teknis dibawah koordinasi Kedepuitan Bidkooor Pollugri Kemenko Polhukam terkait isu perlindungan WNI di luar negeri.

2. Kurangnya *update* informasi dari K/L teknis dibawah koordinasi Kedepuitan Bidkoo Pollugri Kemenko Polhukam terkait isu bidang politik, hukum dan keamanan yang terjadi di luar negeri.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya hal-hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melakukan rapat *stock-tacking* terkait isu perlindungan WNI di luar negeri dengan melibatkan K/L teknis dibawah koordinasi Kedepuitan Bidkoo Pollugri Kemenko Polhukam.
2. Melakukan rapat *stock-tacking* terkait isu bidang politik, hukum dan keamanan yang terjadi di luar negeri dengan melibatkan K/L teknis dibawah koordinasi Kedepuitan Bidkoo Pollugri Kemenko Polhukam.

Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang Politik Luar Negeri yang ditindaklanjuti

$$= \frac{\text{Rekomendasi Kedepuitan Pollugri yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Target Rekomendasi Kedepuitan Pollugri}}$$

$$= \frac{18}{18}$$

Capaian = 100,00%

Tabel 16

Capaian Target Pembangunan Bidang Politik Luar Negeri Pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Capaian 2023	% Capaian 2023
Rekomendasi Kedepuitan Pollugri yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang Politik Luar Negeri dalam dokumen perencanaan nasional	18	18	100,00%
1) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Asia, Pasific dan Afrika	5	5	100,00%
2) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Kerja Sama Amerop	4	4	100,00%
3) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Kerja Sama Kerja Sama ASEAN	6	6	100,00%
4) Rekomendasi Bidang Kerja Sama Kerja Sama Kerja Sama Miltilateral	3	3	100,00%

18 (delapan belas) rekomendasi kebijakan bidang Pollugri tersebut telah ditindaklanjuti sampai dengan periode Tahun 2023, yaitu :

- 1) Rekomendasi dalam rangka Penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri telah ditindaklanjuti oleh Kemlu dan K/L terkait dengan penyelenggaraan Rakor Persiapan Teknis Deportasi WNI-b tanggal 24 Maret 2023 dan pelaksanaan Deportasi tanggal 24 Maret 2023. Status rekomendasi telah



- selesai dilaksanakan, dengan tetap memonitor perkembangan pasca ketibaan WNI-b di Indonesia.
- 2) Rekomendasi Penguatan Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO, Khususnya Terhadap PMI Non-Prosedural telah ditindaklanjuti oleh Kemlu dengan disusunnya Rencana Diseminasi Pelindungan WNI Terhadap Bahaya TPPO di 4 Provinsi, yang disampaikan melalui Surat Dit PWNI Kemlu nomor 05851/PK/03/2023/66 tanggal 28 Maret 2023. KPPPA juga mendorong penyelesaian Rperpres dan menyelenggarakan Diseminasi Perpres 19/2023 ttg RAN PP TPPO 2020-2024.
 - 3) Surat Menko Polhukam Nomor B-31/LN.00.01/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 ditujukan kepada Wakil Presiden RI tentang Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Studi Mahasiswa Indonesia Penerima Beasiswa Pemprov Papua di *Colorado State University*, Amerika Serikat telah ditindaklanjuti dengan kegiatan verifikasi data mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, yang dilakukan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemdagri bersama Pemerintah Provinsi dan ditargetkan selesai paling lambat tanggal 21 Maret 2023. Hal ini disampaikan perwakilan Kemdagri dalam Rapat Koordinasi membahas Perkembangan Terkini Penanganan Isu Beasiswa Papua, yang diselenggarakan secara virtual oleh oleh Deputy V, Kantor Staf Presiden pada tanggal 14 Maret 2023.
 - 4) Surat Deputy Bidkoo Pollugri Nomor B-1126/LN.00.02/04/2023 tanggal 12 April 2023 hal Rekomendasi Kebijakan mengenai situasi krisis Myanmar dan Keanggotan Timor Leste di ASEAN. Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui surat Kemlu Nomor 0068/KA03/2023/42/06 tanggal 30 Maret 2023 mengenai implementasi program hibah magang aparatur sipil Timor-Leste Mei-September 2023 di K/L pemangku badan sektoral Masyarakat ASEAN.
 - 5) Surat Deputy Bidkoo Pollugri B-1973/LN.00.02/06/2023 Rekomendasi perihal Kebijakan mengenai Pengamanan Infrastruktur Kritis Bawah Laut. Rekomendasi telah ditindaklanjuti melalui pelaksanaan FGD isu-Isu Maritim ASEAN pada 16 September 2023 di Bogor, Jawa Barat untuk membahas isu-isu maritim strategis guna diangkat pada pertemuan ASEAN *Maritime Forum dan Expanded ASEAN Maritime Forum*, Agustus 2023.
 - 6) Surat Menko Polhukam Nomor B-67/LN.00.02/4/2023 kepada Mensesneg, Menlu dan Panglima TNI tanggal 28 April 2023 perihal Rekomendasi Kebijakan Keterlibatan dalam kegiatan KTT ASEAN. Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh BNPT melalui penyampaian ringkasan hasil *assessment system* pengamanan pada venue KTT ASEAN ke-42 sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020.
 - 7) Rekomendasi Penanganan Kepesertaan Israel pada FIFA U-20 World Cup 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kemenkominfo dengan mengundang K/L terkait dengan penyelenggaraan Rakor Penyusunan Narasi Tunggal



- tanggal 8 Maret 2023 melalui surat undangan B-256/DJIKP.5/IK.04.03/03/2023 tanggal 7 Maret 2023.
- 8) Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme HAM Internasional Tahun 2023 telah ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK dengan mengundang K/L terkait dengan penyelenggaraan Rapat Tindak Lanjut Pemetaan List of Issues ICESCR tanggal 15 September 2023 melalui surat undangan surat undangan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kemenko PMK nomor 1514/ROREN/KL.03.01/06/2023 tanggal 13 September 2023. Laporan ICESCR Indonesia telah disampaikan kepada Komite ICESCR melalui PTRI Jenewa sesuai tenggat waktu akhir bulan September 2023.
 - 9) Rekomendasi Surat Deputy Bidkoo Pollugri Kemenko Polhukam nomor B-1076/LN.00.00/3/2023 tanggal 21 Maret 2023 telah ditindaklanjuti oleh BNPT dengan memasukkan bahasan kerja sama RI-Australia pada rangkaian kegiatan di Australia, yaitu (i) Pertemuan Ahli terkait Rehabilitasi dan Reintegrasi pada 12 September 2023 di Sydney, (ii) Pertemuan ke-9 Konsultasi Bilateral Kerja Sama Penanggulangan Terorisme RI-Australia pada 14 September 2023 di Canberra, dan (iii) Pertemuan *Indonesia-Australia Counter Violent Extremism (CVE) Strategic Dialogue Deep Dive on Foreign Terrorist Fighters (FTFs)* pada 15 September 2023 di Canberra.
 - 10) Rekomendasi nomor B-2311/LN.00.01/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 kepada Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu ditindaklanjuti dengan surat Direktur Penataan Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor B-1422/DJSDPPI.2/SP.01.03/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Hasil Pembahasan Isu Stasiun Bumi Kedubes Rusia pada Pertemuan Koordinasi Satelit Indonesia-Rusia. Dalam surat tersebut disampaikan hasil pembahasan atas agenda *Discussion of Installation and use of an Earth station at the Russian Embassy in Jakarta to operate as part of the EXPRESS8/8B (96.5E) and EXPRESS-5/5B (53E) satellite networks to support diplomatic communications with the Russian Ministry of Foreign Affairs* yang dituangkan dalam dokumen *Summary Record of Satellite Coordination Meeting between The Administrations of The Republic of Indonesia and The Russian Federation* pada section 3.1.
 - 11) Rekomendasi mengenai penyelenggaraan Latihan Bersama ASEX-01 N di Natuna Utara telah ditindaklanjuti melalui Siaran Pers Mabes TNI Nomor: SP-238/IX/2023 dengan judul "Kompak, ASEAN Wujudkan Maritime Security Dalam ASEX-01 N". Mabes TNI telah menindaklanjuti rekomendasi Kemenko Polhukam dengan menyusun narasi media massa kegiatan ASEX-01 N yang difokuskan pada isu penanganan bencana guna menghindari potensi dampak negatif pemberitaan pelibatan Myanmar di latihan bersama di ASEX-01 N.

- 12) kegiatan verifikasi data mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, yang dilakukan oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemdagri bersama Pemerintah Provinsi dan ditargetkan selesai paling lambat tanggal 21 Maret 2023. Hal ini disampaikan perwakilan Kemdagri dalam Rapat Koordinasi membahas Perkembangan Terkini Penanganan Isu Beasiswa Papua, yang diselenggarakan secara virtual oleh oleh Deputy V, Kantor Staf Presiden pada tanggal 14 Maret 2023.
- 13) Surat Direktur Penataan Sumber Daya, Kementerian Komunikasi dan Informatika nomor B-1422/DJSDPPI.2/SP.01.03/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 kepada Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Kemenko Polhukam perihal Hasil Pembahasan Isu Stasiun Bumi Kedubes Rusia pada Pertemuan Koordinasi Satelit Indonesia-Rusia. Dalam surat tersebut disampaikan hasil pembahasan atas agenda *Discussion of Installation and use of an Earth station at the Russian Embassy in Jakarta to operate as part of the EXPRESS8/8B (96.5E) and EXPRESS-5/5B (53E) Satellite Networks To Support Diplomatic Communications With The Russian Ministry of Foreign Affairs* yang dituangkan dalam dokumen *Summary Record of Satellite Coordination Meeting between The Administrations of The Republic of Indonesia and The Russian Federation* pada section 3.1.
- 14) Surat Kadivhubinter, Polri nomor Fax/563/X/2023/Divhubinter tanggal 25 Oktober 2023 kepada Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kemenko Polhukam perihal Penyampaian Perkembangan Kerja Sama antara Polri dengan Turki. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa draft *Technical Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkiye on Police Education and Training* saat ini masih berada di Dit. Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Kemlu untuk pembahasan internal. Begitu juga dengan usulan kerja sama antara JCLEC dengan Turkish International Academy Against Drugs and Organized Crime (TADOC), saat ini draft masih dalam pembahasan internal Lemdiklat Polri dan Surat tembusan Sekretaris Utama, BNPB nomor B-623/BNPB/SU/KS.01.02/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 kepada Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Kemenko Polhukam perihal Perkembangan Kerja Sama BNPB dengan AFAD Turki. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa draft *MoU on Disaster and Emergency Management* antara BNPB dan AFAD masih harus dibahas kembali antara kedua pihak dengan fokus pada pengaturan dan strategi pendanaan kerja sama, dengan memperhatikan kemampuan pendanaan masing-masing pihak; dan
- 15) Surat Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu nomor 03301/DM/12/2023/59/09 tanggal 19 Desember 2023 kepada Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kemenko Polhukam perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Working Group Penyusunan Narasi

tentang Diaspora/Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) dalam Dokumen RPJMN 2025-2029 dan *Zero Draft Grand Strategy* Peningkatan Peran MILN dalam Pembangunan Nasional. Dalam surat tersebut disampaikan, antara lain (i) Proyek Prioritas Pengembangan dan Implementasi *Grand Strategy* Peningkatan Peran Diaspora/MILN dalam Pembangunan Nasional merupakan besaran yang mencakup 4 (empat) isu utama yang selama ini dihadapi dalam urusan penanganan diaspora/MILN, yaitu kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, pemetaan potensi diaspora/MILN, dan pemberian fasilitas; (ii) pertemuan *Working Group* juga menyepakati bahwa aspek pokok yang perlu terangkum dalam *Grand Strategy* adalah pemetaan potensi diaspora/MILN pada 4 *cluster*, yaitu: 1) Transfer Pengetahuan dan Peningkatan Kapasitas SDM; 2) Manfaat Ekonomi; 3) Ikatan Sosial Budaya; dan 4) Jejaring dan Kolaborasi Global; serta (iii) aspek utama lainnya yang dinilai pertemuan *Working Group* perlu ada dalam *Grand Strategy* adalah pemberian fasilitas, mekanisme koordinasi/business process antar K/L dalam penanganan isu diaspora/MILN, dan penanganan urusan pendataan diaspora/MILN.

- 16) Rekomendasi kebijakan melalui surat Deputy Bidkoo Pollugri Nomor: B-1126/LN/00.02/04/2023 mengenai rekomendasi kebijakan situasi krisis Myanmar dan keanggotaan Timor Leste di ASEAN telah ditindaklanjuti oleh Kemlu melalui Surat Nomor:00688/KA/03/4/42/06 tanggal 30 Maret 2023 mengenai implementasi Program Hibah melalui Program Magang Aparatur Sipil Timor Leste, Mei-September 2023. Program magang telah diselenggarakan untuk tiga puluh ASN Timor Leste yang ditempatkan di K/L badan sektoral Pilar Masyarakat ASEAN untuk menjalani program magang.
- 17) Rekomendasi surat Deputy Bidkoo Pollugri Nomor: B-1973/LN00.02/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 mengenai pengamanan infrastruktur kritikal bawah laut kepada Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP. Rekomendasi ditindaklanjuti melalui penyelenggaraan FGD oleh Kemlu mengenai Isu-Isu Maritim ASEAN pada 16 Juni 2023 di Bogor, Jawa Barat.
- 18) Rekomendasi surat Deputy Bidkoo Pollugri Nomor: B-2682/LN00.02/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 kepada Asops Panglima TNI. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Mabes TNI melalui Siaran Pers Mabes TNI Nomor: SP-238/IX/2023 dengan judul “Kompak, ASEAN Wujudkan *Maritime Security* Dalam ASEX-01 N”.

Secara umum, tidak terdapat kendala/habatan berarti dalam pengawalan tindak lanjut rekomendasi pada tahun 2023. Adapun tantangan yang dihadapi selama tahun 2023 adalah kurangnya informasi dari K/L

pelaksana rekomendasi terkait tindak lanjut maupun hasil aksi lanjut yang telah dilaksanakan oleh K/L secara resmi.

Di masa mendatang, dalam menghadapi tantangan tersebut, kiranya Kedeputusan Bidkooor Pollugri akan meningkatkan fungsi pengendalian melalui rapat tindak lanjut maupun pengajuan surat tanggapan kepada K/L pelaksana rekomendasi.

➤ Sasaran Strategis : Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal

1. Indikator Kinerja 1 : Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah.

Berikut Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I sesuai Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 17
UNSUR-UNSUR PENILAIAN SAKIP

No	Komponen	Bobot
a.	Perencanaan Kinerja	30%
b.	Pengukuran Kinerja	30%
c.	Pelaporan Kinerja	15%
d.	Evaluasi Internal	25%
Total Nilai =		100%

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Nomor B-317/PW.03.00/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 adalah 76,90 dengan kategori BB (sangat baik). Komponen, bobot serta hasil penilaian SAKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 18
Hasil Penilaian SAKIP per Komponen Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,90
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
d.	Evaluasi Internal	20	19,00
Total Nilai =		100	76,90
Kategori =		BB	

Tabel 19
Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 sampai dengan 2023

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
e.	Perencanaan Kinerja	24,25	25,89	28,30	22,50	24,00
f.	Pengukuran Kinerja	20,10	18,13	18,44	22,20	21,90
g.	Pelaporan Kinerja	10,63	9,80	10,00	12,00	12,00
h.	Evaluasi Internal	6,69	7,88	8,06	20,00	19,00
i.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	13,09	15,42	15,04	-	-
Total Nilai =		76,08	77,12	79,84	76,70	76,90
Kategori =		BB	BB	BB	BB	BB

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun penurunan yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan sistem penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP yang disesuaikan dengan Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai rekomendasi Inspektur pada Nota Dinas Inspektur Nomor B-317/PW.03.00/11/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Laporan Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 terdapat beberapa kekurangan pada implementasi SAKIP Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023.

1. Belum didokumentasikannya evaluasi dokumen perencanaan secara berkala.
2. Belum adanya tata cara rewiu internal atas dokumen Laporan Kinerja di lingkungan Kedepuitan Bidkooor Pollugri.

Menindaklanjuti kekurangan diatas dan dalam rangka meningkatkan SAKIP pada unit kerja Kedepuitan Bidkooor Pollugri akan dilakukan hal-hal berikut.

1. Menyusun formulir monitoring dan evaluasi dokumen rencana aksi tahunan unit kerja Kedeputian Bidkooor Pollugri.
2. Menyusun tata cara reuiu internal atas dokumen Laporan Kinerja di lingkungan Kedeputian Bidkooor Pollugri.
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, dll.

2. Indikator Kinerja 2 : Nilai PMPRB

Sumber data capaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Unit Kerja Eselon I oleh Inspektorat Kemenko Polhukam paling terakhir. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2022 adalah 35,09.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu :

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penguatan Pengawasan
6. Penatan Sistem Manajemen SDM
7. Penguatan AKuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sumber data Penilaian dalam PMPRB adalah Laporan Hasil Evaluasi PMPRB Unit Kerja Eselon I oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Karena tahun 2023 tidak dilakukan penilaian mandiri Unit Kerja Deputy Bidkooor Pollugri maka penilaian tahun 2023 unit Deputy Bidkooor Pollugri mengacu pada hasil penilaian tahun 2022.

Adapun upaya yang dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dalam rangka meningkatkan nilai Penilaian dalam PMPRB Tahun 2023:

1. Manajemen Perubahan

- Telah menyusun draft pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.
- Telah disusun Draft Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Melaksanakan kebijakan eselonisasi atau peralihan pejabat Eselon III dan IV menjadi fungsional.

3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Koordinasi terkait revisi Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

4. Penataan Sumber Daya Manusia

- Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2023
- Pelaksanaan Diklat dalam rangka pengembangan SDM diklat manajemen keuangan negara melalui Nodin Nomor 153/KP.08.05/3/2023.
- Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
- Pemberlakuan jadwal WFO dan WFH bagi pegawai Kedeputusan Pollugri

5. Penataan Tata Laksana

- Telah dilaksanakannya *review* SOP Kedeputusan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
- Tersusunnya konsep SOP baru mengenai pendataan dan pemeliharaan Barang Milik Negara

6. Penguatan Pengawasan

- Pelaporan LHKPN 100%
- LHKASN sampai dengan Triwulan I masih pada tahap pengumpulan data

7. Penguatan Akuntabilitas Kerja

- Menyusun Perjanjian Kinerja Eselon I s.d. staf periode tahun 2023
- Menyusun IKU 2020-2024
- Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Penyebaran kuisiner pada rapat koordinasi terkait layanan yang diberikan;
- Kedeputusan Deputy Bidkoor Pollugri terdapat SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan media sosial Pollugri yang terus di *update* serta *review* internal terhadap pelayanan kedeputusan

Tabel 20

Rincian Penilaian PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri 2020-2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
PENGUNGKIT		36,30	28,64	30,49	35,09
I	Pemenuhan	14,60	12,27	12,88	14,20
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,22	1,82	2,00
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,75	1,00	1,00
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,67	1,67	1,75
4.	Penataan Tatalaksana	1,00	0,94	0,88	0,95
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,38	1,34	1,35
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,31	2,45
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	1,93	1,90	2,25
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	2,50	1,89	1,99	2,45

No	Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
II.	Reform	21,70	16,37	17,61	20,89
1.	Manajemen Perubahan	3,00	1,00	2,75	2,95
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,50	1,50	1,95
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	1,50
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	2,25	2,25	3,55
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,25	1,25	1,79
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,58	3,07	3,55
7.	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95	1,95
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan	3,75	3,34	3,34	3,65

Secara keseluruhan nilai PMPRB Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2021. Namun Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tetap memperhatikan peningkatan kinerja organisasi sebagai implementasi Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja 3 : Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri merupakan hasil survey Layanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri kepada stakeholder Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik internal Kemenko Polhukam maupun external Kemenko Polhukam yang dilakukan sepanjang tahun 2023. Nilai yang diambil adalah nilai yang paling sering muncul (*modus*) pada hasil perhitungan survei.

Tabel 21
Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri tahun 2019 s.d. 2023

Komponen	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2023
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	4	4	4	4	4	4

Pelaksanaan perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dilakukan pada Desember 2023. Survei dilakukan kepada seluruh unit di lingkungan Kemenko Polhukam dengan memberikan 9 (sembilan) pertanyaan. Koresponden yang mengisi survey Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri sebanyak 25 orang. Responden yang memberikan point 4 pada pertanyaan sebanyak 136 dan responden yang mengisi point 3 pada pertanyaan sebanyak 89.

Pengukuran perhitungan Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terdiri atas:

a. Aspek Internal;

Pada Aspek Internal dilakukan pengukuran kepuasan layanan dengan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dari unsur-unsur :

- Layanan Kepegawaian;
- Layanan Persuratan;
- Layanan Kearsipan;
- Layanan Kelembagaan dan Organisasi; dan
- Layanan Umum.

b. Aspek Eksternal.

Pada Aspek Eksternal dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada seluruh stake holder Unit Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, baik pada personil Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri maupun diluar unit kerja Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Dalam rangka pencapaian dan peningkatan komponen Nilai/Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri selama tahunan 2023 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membuat identifikasi variable Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Sekretaris Kedeputian Bidkooor Pollugri, menetapkan responden, tempat dan waktu pelaksanaan pengisian survei dan pengumpulan data untuk bahan Survei;
- b) Pengelolaan arsip (Surat keluar dan surat masuk) di Deputy Bidkooor Pollugri;
- c) Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar;
- d) Pengisian Rencana dan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai hardcopy dan pengisian pada <http://simpeg.polkam.go.id>;
- e) Membuat validasi data pegawai di lingkungan Deputy Bidkooor Pollugri, Data Inventaris Ruangan dan mengikuti kegiatan Bimtek SAKIP dan PMPRB Unit Kerja.
- f) Penyebaran kuisisioner setiap rapat,
- g) Menerima audiensi dari para stake holder Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,
- h) Pemenuhan sarana dan prasarana ruang kerja

Survei Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan yang disebarkan pada akhir tahun secara bersamaan dengan Unit Kesekretariatan Kedeputian Lainnya di lingkungan Kemenko Polhukam menyebabkan kejenuhan dari responden dalam mengisi survei yang serupa sehingga jumlah responden belum maksimal. Hal ini merupakan tantangan dan hambatan dalam capaian Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023.

Kedepannya Sekretariat Deputy Bidkoo Pollugri akan melakukan pendekatan persuasif kepada para responden dalam rangka meningkatkan jumlah responden pada survey Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Deputy Bidkoo Pollugri.

C. Efisiensi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kedepuitan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri didukung oleh 33 orang, yaitu :

- 1 orang Eselon I sebagai Deputy
- 4 orang Eselon II sebagai Asisten Deputy
- 1 orang Eselon II sebagai Sekretaris Deputy
- 8 orang Eselon III sebagai Kepala Bidang
- 2 orang Eselon III sebagai Kepala Bagian
- 4 orang Eselon IV sebagai Kepala Sub Bagian
- 6 orang analis bidang Politik Luar Negeri dan
- 7 orang tenaga administrasi bidang Politik Luar Negeri.

Jumlah sumber daya manusia tersebut belum mencapai kondisi ideal, dimana unit kerja eselon II hanya memiliki 1 atau 2 orang analis. Demikian pada unit kerja Sekretaris Deputy masih terdapat posisi jabatan yang kosong, yaitu perencana dan pengevaluasi program dan kinerja.

Namun dengan keterbatasan sumber daya tersebut Kedepuitan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri berusaha mengefisienkan dan mengefektifkan seluruh sumber daya manusia yang ada agar tetap mampu memenuhi target kinerja dan target sasaran strategis Tahun 2023.

Pagu awal DIPA Deputy Bidkoo Pollugri Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.332.340.000. Sesuai Nota Dinas Sesmenko Nomor B-307/PR.01.00/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* (cadangan pemotongan) anggaran bahwa *Automatic Adjustment* (cadangan pemotongan) Kedepuitan Bidkoo Pollugri sebesar Rp1.998.518.000. Sesuai Nota Dinas Sesmenko Nomor B-207/PR.03.00/9/2023 tanggal 5 September 2023 perihal Penyampaian Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* Kemenko Polhukam T.A. 2023 bahwa Relaksasi Anggaran *Automatic Adjustment* Kemenko Polhukam T.A. 2023 Kedepuitan Bidkoo Pollugri sebesar Rp1.723.718.000. Pagu Anggaran per 31 Desember 2023 anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menjadi Rp13.057.540.000.

Meskipun Pagu Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pollugri mengalami perubahan penurunan Pagu awal tahun 2023 dan penambahan pada akhir periode T.A. 2023, hal tersebut tidak menurunkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pollugri. Penyesuaian-penyesuaian dilakukan demi tercapainya target kinerja tahun 2023.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.057.540.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 12.935.110.504,- (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah). Secara kualitas dana yang terserap untuk mendukung kegiatan tersebut sebesar 99,06% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 22
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2023
Berdasarkan Eselon II atau Rincian Output

Kode	Uraian	PAGU	Realisasi	%
ABC.001	Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika	2.499.226.000	2.485.488.584	99,46 %
ABC.002	Koordinasi Kerjasama Amerika Eropa	2.221.112.000	2.207.385.258	99,38 %
PBC.001	Koordinasi Kerjasama ASEAN	2.489.314.000	2.476.360.725	99,48 %
PBC.002	Pengawasan/Pengendalian Kepemimpinan pada Pilar Masyarakat Polkam	2.725.200.000	2.676.781.684	98,22 %
ABC.004	Koordinasi Kerjasama Multilateral	1.587.935.000	1.581.621.763	99,60 %
ABE.ABD	Sekretariat Deputy Bidkooor Politik Luar Negeri	1.534.753.000	1.507.472.480	98,22 %
Total =		13.057.540.000	12.935.110.504	99,06%

Dalam mencapai sasaran strategis kinerja Tahun 2023, Kedepuitan Bidkooor Pollugri didukung anggaran dengan rincian anggaran per Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 23
Pagu dan Realisasi Anggaran Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2023 Berdasarkan Sasaran Strategis

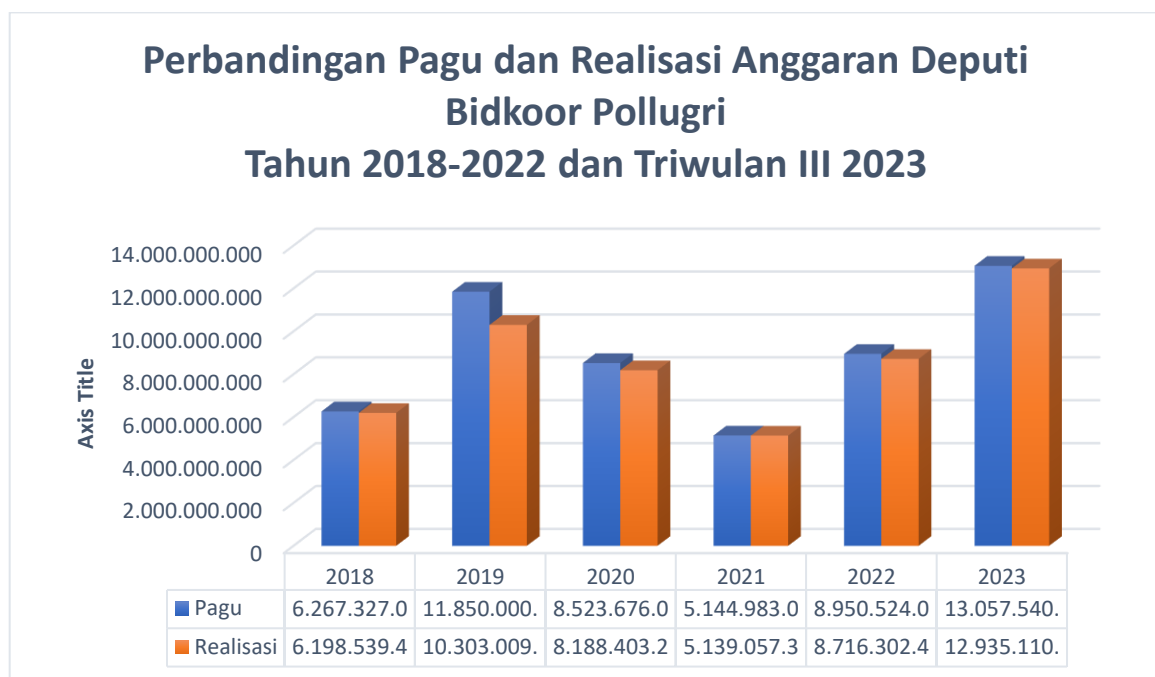
Sasaran Strategis	PAGU	REALISASI TA 2023	% Realisasi
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Luar Negeri lintas sektoral yang efektif;	11.522.787.000	8.056.060.075	69,91%
2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang optimal	1.534.753.000	1.081.351.234	70,46%
TOTAL KEDEPUTIAN II 2023	13.057.540.000	12.935.110.504	99,06%

Perbandingan Data Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2023 Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan 2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pagu	6.267.327.000	11.850.000.000	8.523.676.00	5.144.983.000	8.950.524.000	13.057.540.000
Realisasi	6.198.539.473	10.303.009.696	8.188.403.211	5.139.057.384	8.716.302.484	12.935.110.504
% Realisasi	98,100%	100,95%	96,07%	99,88%	97,38%	99,06%

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2023 Deputy Bidkooor Pollugri Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan 2023



Beberapa tantangan dan hambatan dalam capaian realisasi anggaran Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun 2023.

1. Relaksasi *Automatic Adjustment* yang baru dapat digunakan secara maksimal periode Triwulan IV T.A. 2023 (Oktober 2023).
2. Sistem *at cost* pada biaya transport membuat realisasi transport tidak maksimal.
3. Selisih kurs USD (tarif USD Rp16,000 ditetapkan pada dokumen revisi terakhir (November 2023) namun pada saat pelaksanaan perjalanan dinas LN akhir November dan awal Desember 2023).

Menindaklanjuti kekurangan diatas unit kerja Kedeputian Bidkooor Pollugri akan menyusun langkah-langkah antisipatif jika Relaksasi *Automatic Adjustment* T.A. 2024 terjadi pada periode Triwulan IV T.A. 2024 dengan monitoring dan evaluasi rencana kegiatan dan realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala (bulanan).

BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2023 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun Anggaran 2023 atas penggunaan anggaran pada tahun 2023 dan periode tahun ketiga RPJMN 2020-2024.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2023 menyajikan narasi komprehensif mengenai aspek organisasi Kemenlu dan peran strategisnya dalam mendukung capaian pembangunan nasional, perencanaan kinerja, serta utamanya menyajikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri beserta analisis pencapaiannya. Selain itu, disajikan pula kendala dan tantangan yang dihadapi, langkah solutif yang telah dilaksanakan serta proyeksi ke depan sebagai bentuk evaluasi guna pencapaian target di tahun berikutnya.

Selama tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri menghadapi sejumlah tantangan dan kendala dalam mencapai target kinerja, yaitu:

1. proses *recovery* setelah masa pandemi Covid-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung menimbulkan resesi global, terutama isu sumber daya energi, pada beberapa negara yang terdampak.
2. Belum maksimalnya *update* informasi dari K/L teknis dibawah koordinasi Kedepuitan Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam terkait isu perlindungan WNI di luar negeri.
3. Belum maksimalnya informasi dari K/L teknis dibawah koordinasi Kedepuitan Bidkoor Pollugri Kemenko Polhukam terkait isu bidang politik, hukum dan keamanan yang terjadi di luar negeri.
4. Relaksasi *Automatic Adjustment* yang baru dapat digunakan secara maksimal periode Triwulan IV T.A. 2023 (Oktober 2023).

Tahun 2024 menjadi periode yang penting bagi Pemerintah karena merupakan tahun terakhir periode RPJMN 2020-2024 serta akan dilaksanakannya Pemilu Presiden dan pemilihan kepala-wakil kepala daerah serentak. Kedepannya Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri akan mengantisipasi tantangan dan kendala yang mungkin akan menjadi penghambat tercapainya target tahun 2024 melalui hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penanganan isu penyelesaian kasus WNI di luar negeri dalam rangka perlindungan WNI di luar



negeri terutama pada kasus terorisme, TPPO dan penyelesaian beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.

2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penanganan isu global yang ditangani Kemenko Polhukam terkait optimalisasi politik luar negeri antara lain terkait penanggulangan terorisme (*Foreign Terrorist Fighters*), TPPO dan Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam rangka peningkatan dimensi *Governance and Rule of Law* pada Indeks Citra Positif Indonesia di Mata Dunia Internasional.
3. Menyusun langkah-langkah antisipatif untuk *Automatic Adjustment* tahun 2024.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2023 diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sekiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Tahun anggaran 2023 dapat dijadikan sebagai umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode triwulan maupun tahun yang akan datang.

--00-00--



LAMPIRAN